

BAB II

LATAR BELAKANG BERDIRINYA PKO MUHAMMADIYAH

Permulaan abad XX merupakan era baru kebijakan pemerintah Belanda di kawasan Hindia Belanda. Eksploitasi besar-besaran terhadap tanah jajahan mengalami penurunan dari kebijakan sebelumnya. Semua itu digantikan dengan kebijakan baru yang memberi kelonggaran bagi pribumi untuk memperoleh haknya sebagai rakyat. Kebijakan baru tersebut oleh pemerintah Belanda dinamakan Politik Etis.

Selama berlangsungnya Politik Etis di Kolonial Belanda, muncul kesadaran sebagian dari golongan pribumi untuk berserikat dan menunjukkan eksistensinya. Mereka adalah para pelajar yang menempuh pendidikan hasil Politik Etis. Mereka membentuk perkumpulan seperti Budi Oetomo, Taman Siswa, Indische Partij, Sarekat Islam, Muhammadiyah dan masih banyak organisasi-organisasi lainnya yang lahir pada masa kebijakan Politik Etis. Terlepas dari banyaknya organisasi yang banyak muncul di Masa Politik Etis ada satu organisasi yang dibentuk bukan oleh kalang terpelajar, yaitu Muhammadiyah.

Muhammadiyah lahir pada 18 November 1912. Muhammadiyah lahir dari seorang K.H. Ahmad Dahlan yang prihatin akan kondisi sosial masyarakat di sekitarnya. Penolong Kesengsaraan Omoem (PKO) merupakan salah satu amal usaha Muhammadiyah yang bergerak dibidang sosial. Munculnya PKO merupakan gagasan luar biasa dari para pengurus Muhammadiyah. Latar belakang lahirnya PKO Muhammadiyah pun dipengaruhi beberapa faktor mulai dari

kesenjangan Politik Etis, reaksi terhadap gerakan zending¹ dan misionaris² dibidang sosial, dan realisasi pengajaran surat Al-Ma'un.

A. Kesenjangan dalam Pelaksanaan Politik Etis

Lahirnya kebijakan Politik Etis bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Hindia Belanda. Caranya ialah intervensi langsung negara dalam kehidupan ekonomi, yang tercantum dalam slogan “irigasi, edukasi, dan emigrasi.”³ Keterlibatan pemerintah dalam sektor-sektor penting tersebut, menjadikan pemerintah secara langsung harus mengurus seluruh kebutuhan masyarakat yang ada di Hindia Belanda. Guna merealisasikannya langkah yang akan dilakukan, pemerintah mensponsori dan sebagian membiayai sekolah-sekolah desa, pembangunan jalan-jalan, bank-bank kredit desa, klinik dan pos-pos peningkatan hasil bumi yang semuanya bertujuan untuk membebaskan kaum tani dari belenggu masa lampau yang membebani.⁴ Upaya tersebut ditempuh sebagai wujud balas budi pemerintah Belanda terhadap pribumi.

¹ *Zending* adalah usaha-usaha menyebarkan agama Kristen. . Lihat Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 1632.

² *Misionaris* orang yang dikirim untuk menyebarkan agama Katolik; orang yang dikirim sbg anggota misi Katolik. Lihat *Ibid.*, hlm. 961.

³ Soegijanto Padmo, "Perkembangan Sosial Ekonomi Pribumi", dalam *Indonesia dalam Arus Sejarah: MasaPergerakan Kebangsaan Jilid 5*. (ed) Taufik Abdullah & A. B. Lopian, (Jakarta: PT. Ictiar Bau van Hoeve, 2011), hlm. 212.

⁴ Harry J. Benda, “The Cresent and Rissing Sun: Indonesian Islam under the Japanese Occupation 1942-945”, terj. Daniel Dhakidae, *Bulan Sabit dan Matahari Terbit: Islam Indonesia masa Pendudukan Jepang*. (Bandung: PT. Tarate, 1985), hlm. 56.

Kesungguhan pemerintah Kolonial Belanda nampak nyata dari banyaknya perubahan yang dilakukan oleh pemerintah dari segi birokrasi yang terlibat langsung dengan kebijakan Politik Etis, diantaranya,

Berbagai lembaga pemerintah didirikan atau dibenahi, misalnya Departemen pertanian, Industri, dan Perdagangan pada tahun 1914; Departemen Pekerjaan Umum pada 1908; dan Departemen Pendidikan pada tahun 1908. Selain itu, dilakukan pada lembaga pelayanan baru, seperti Badan Penyuluhan (*Landbouvoorlichtingdienst*) pada 1910, Pelayanan Kesehatan Masyarakat (*Burgerlijke Geneeskundigendienst*) dan bank rakyat (*volkscreditwezen*) pada 1912. Badan dan organisasi tersebut bertanggung jawab melaksanakan Politik Etis.⁵

Seluruh lembaga birokrasi tersebut merupakan bagian-bagian penting dalam upaya pemerintah mensukseskan kebijakan Politik Etis.

Secara perlahan kebijakan Politik Etis terus berjalan diseluruh Hindia Belanda. Pendidikan dan kesehatan menjadi dua elemen penting dalam pelaksanaan Politik Etis. Kedua bidang tersebut menjadi tolok ukur pemerintah dalam upaya memanusiawikan penduduk pribumi di Hindia Belanda, namun meski kebijakan Politik Etis dikatakan sebagai upaya balas budi realisasinya tetap saja masih ada kesenjangan didalamnya.

1. Diskriminasi Fasilitas Pendidikan

Pembangunan fasilitas pendidikan sebenarnya sudah mulai berjalan sejak Abad ke 19. Pada tahun 1850 pemerintah mulai mendirikan Sekolah Kelas Satu yang diperuntukan bagi pegawai *pamong praja* (golong priyayi) di Hindia Belanda.⁶ Lambat laun pendidikan menjalar dan menarik minat bagi rakyat

⁵Soegijanto Padmo, *loc.cit.*

⁶ Tim Proyek Penelitian dan Pmencatatan Kebudayaan Daerah, *Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Jawa Tengah*. (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1978), hlm. 23.

biasa, akhirnya pemerintah pun membangun Sekolah Kelas Dua yang diperuntukan bagi rakyat biasa pada tahun 1892.⁷ Setelah munculnya Politik Etis pembangunan sekolah untuk pribumi pun semakin digiatkan. Pembangunan sekolah seperti Sekolah Kelas Satu, Sekolah Kelas Dua, Sekolah Desa (*Volkschool*), *Holland Indslanche School* (HIS)⁸ serta sekolah sekolah lanjutan yang diperuntukan bagi pribumi meningkat.

Pembangunan sekolah sekolah tersebut diharapkan bisa memperbaiki kesejahteraan masyarakat pribumi, namun kenyataan mengatakan bahwa kurang dari 7 % penduduk pribumi tersentuh pendidikan sampai dengan era kemerdekaan.⁹ Hal tersebut terjadi karena masih adanya diskriminasi terhadap pribumi ataupun masyarakat non-eropa di Hindia Belanda. S. Nasution mengungkapkan hanya sekitar 4% dari anak-anak mendapat tempat di Sekolah Kelas Dua, alasan politik dan finansial menjadi faktor pemerintah enggan menyebarluaskan Sekolah Kelas Dua.¹⁰ Kondisi tersebut pun menjadikan hanya sedikit pribumi yang bisa menikmati pendidikan di Sekolah Kelas Dua. Lebih ironis lagi sebagai bentuk dikriminasi kaum bawah, pemerintah melalui *Staadblad* 1914 no. 359 mengatur bahwa kemungkinan orang tua mengirim anaknya ke HIS harus melalui beberapa ketentuan yaitu keturunan, jabatan,

⁷ S. Nasution, *Sejarah Pendidikan Indonesia*. (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2011), hlm. 61.

⁸ HIS adalah sekolah tingkat lanjutan yang dipribumi tanpa harus masuk ke sekolah Eropa. Lihat Tim Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, *op.cit.*, hlm. 23.

⁹ Soegijanto Padmo, *op.cit.*, hlm. 215.

¹⁰ S. Nasution, *op.cit.*, hlm. 79.

kekayaan dan pendidikan.¹¹ Ketentuan tersebut menunjukkan betapa pemerintah memang mendiskriminasi rakyat kelas bawah untuk memperoleh pendidikan. Sangat ironi memang jika melihat kondisi tersebut, jika pendidikan menjadi hak semua masyarakat tentu saja cara dan akses harus disamakan dan dipermudah tanpa adanya diskriminasi.

2. Terbatasnya Pelayanan Kesehatan bagi Pribumi

Pada awal abad XX pembangunan fasilitas kesehatan tidak kalah gencarnya dibandingkan dengan pembangunan fasilitas pendidikan. Kesadaran akan pentingnya kesehatan bagi pribumi mulai tumbuh dari kalangan pemerintah Kolonial Belanda, terlepas itu dari kepentingan sosial maupun politik. Fenomena perkembangan pesat pembangunan rumah sakit tersebut dilakukan oleh zending sejak pertengahan abad XIX hingga awal abad XX dalam upayanya menyebarluaskan agamanya.¹² Pembangunan rumah sakit juga marak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang dibantu oleh pemerintah dalam pembangunannya. Pada bagian ini akan membahas rumah sakit-rumah sakit pemerintah sementara fenomena rumah sakit zending akan dibahas pada bagian lain bab ini.

¹¹ Nina Herlina Lubis, "Pendidikan, Mobilitas Sosial dan Munculnya Elite Modern", dalam *Indonesia dalam Arus Sejarah: Masa Pergerakan Kebangsaan Jilid 5*. (ed) Taufik Abdullah & A. B. Lopian, (Jakarta: PT. Ictiar Bau van Hoeve, 2011), hlm. 255.

¹² Baha'uddin, "Perubahan dan Keberlanjutan: Pelayanan Kesehatan Swasta di Jawa Sejak Kolonial sampai Pasca Kemerdekaan", *Kota-kota di Jawa*. (ed) Sri Margana & M. Nursam, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2010), hlm. 163.

Pembangunan rumah sakit memang marak dilakukan pada masa Politik Etis. Hal tersebut dilakukan dalam rangka memperluas pelayanan kesehatan bagi masyarakat khususnya di Jawa. Guna mempermudah pembangunan rumah sakit maka pemerintah pun melakukan kerjasama dengan perusahaan perkebunan untuk membangun fasilitas kesehatan atau rumah sakit. Oleh karena pada tahun 1919 pemerintah membuat perjanjian mengenai pembiayaan pembangunan rumah sakit swasta dengan yang dikelola oleh perusahaan perkebunan.¹³

Terdapat tiga poin perjanjian dalam kerja sama antara pemerintah Kolonial Belanda dalam hal ini Dinas Kesehatan Sipil dengan perusahaan perkebunan di Jawa mengenai pengelolaan rumah sakit, yaitu: ¹⁴

- a) Jika tempat perusahaan perkebunan tersebut satu wilayah dengan sebuah rumah sakit milik pemerintah maka perusahaan tersebut harus ikut bertanggung jawab terhadap sejumlah perawatan yang dihitung per tempat tidur. Hal ini berhubungan dengan prinsip yang dikembangkan pemerintah Kolonial Belanda yang sudah mulai mengurangi sedikit mungkin keterlibatannya dalam bidangnya. Sehingga pembiayaan perawatan orang sakit, manajemen dan penggunaan rumah sakit dan inventaris yang ada di dalamnya harus diserahkan kepada perusahaan perkebunan tersebut sebagai ganti pembayaran suatu pajak tertentu. Pemerintah disatu sisi melakukan pembayaran bagian-bagian pembiayaan yang oleh rumah sakit dirasakan sebagai kendala dalam mengelolanya. Bagian pembiayaan yang ditanggung

¹³ *Ibid.*, hlm. 169.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 169-170.

pemerintah dalam hal ini adalah pembiayaan mengenai pemeliharaan dan penerangan rumah sakit, persediaan air bersih, gaji karyawan dan staf, makanan, obat-obatan dan sebagainya yang harus dibebankan kepada pasien yang menggunakan jasa rumah sakit tersebut.

- b) Sebaliknya dari poin di atas, bahwa sejumlah tempat tidur yang harusnya menjadi tanggung jawab perusahaan perkebunan namun mereka belum mampu dalam bagian pembiayaan dengan pemerintah maka pembayaran harus ditanggung oleh perusahaan perkebunan pada bagian yang tersebut dalam poin pertama atau pembiayaan lainnya yang menjadi beban rumah sakit.
- c) Pemerintah dan perusahaan perkebunan membangun sebuah rumah sakit yang ditanggung bersama, masing-masing mempunyai kontribusi yang proporsional dalam pengembangan kedepan rumah sakit tersebut dan pembiayaannya.

Pembangunan rumah sakit yang dilakukan bersama dengan perusahaan banyak didirikan di Jawa. Pembangunan tersebut dilakukan bertahap di setiap daerah misalnya saja di Cirebon pada 3 Maret 1920 dibangun rumah sakit Kotapraja, di Bandung pada 5 Juli di bangun rumah sakit bersalin dan perawatan anak, dan rumah sakit lainnya di daerah Yogyakarta, Surakarta, Garut, Tasikmalaya serta Indramayu.¹⁵

Rumah sakit pemerintah yang dibangun bersama dengan perusahaan perkebunan menguntungkan bagi pemilik perusahaan. Perusahaan-perusahaan

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 170.

layanan pekerja dan penduduk disekitar perusahaan. Akan tetapi tidak semua buruh dapat merasakan fasilitas yang di bangun oleh pemerintah mereka harus memperoleh rekomendasi dari *landwedge*¹⁶. Pertimbangan untung rugi pun harus tetap dilakukan oleh pemilik perusahaan dalam mengambil kebijakan mengenai kesehatan para pegawainya. Selain pemotongan gaji makanan yang didapat buruh selama dirawat dirumah sakit juga dianggap hutang yang harus dibayar pada saat menerima upah.¹⁷ Kondisi tersebut tentu saja menjadikan semakin tertindasnya masyarakat kelas bawah di Era Politik Etis. Fasilitas kesehatan yang seharusnya bisa didapatkan dengan mudah oleh masyarakat kelas bawah di era politik hutang budi justru tidak jauh beda dengan politik-politik sebelumnya.

B. Reaksi Terhadap Gerakan Zending dan Misionaris

Jalannya kebijakan Politik Etis tentu saja menjadi tanggung jawab penuh pemerintah Kolonial Belanda. Akan tetapi apabila kondisi realitas yang terjadi seperti dijelaskan pada sub bab sebelumnya, maka pemerintah pastinya akan melibatkan organisasi-organisasi sosial diluar birokrasi pemerintahan. Kondisi tersebut merupakan peluang bagi misi zending maupun misionaris untuk terlibat dalam pelaksanaan Politik Etis di Hindia Belanda. Mereka mulai membangun sekolah-sekolah dan rumah sakit sebagai sarana untuk menyebarkan agama di wilayah Hindia Belanda.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 164.

¹⁷ *Ibid.*

Pembangunan sekolah oleh misionaris mula-mula dibangun di Magelang. Mulai dari munculnya sekolah-sekolah di Mungkid pada tahun 1892, kemudian Tempuran dan Salam pada tahun 1892 kerja misionaris memasuki masa lebih serius setelah tahun 1892 yaitu ditandai dengan berkembang pesatnya pusat-pusat misionaris di Nglamar, Mlaten, Semarang, Ambarawa, Bedana, Magelang, Muntilan Mendut dan Yogyakarta.¹⁸ Perkembangan sekolah misionaris semakin pesat setelah memasuki masa Politik Etis. Hal tersebut terjadi karena ketidakmampuan pemerintah untuk merealisasikan pembangunan sekolah-sekolah untuk pribumi baik dasar maupun lanjutan. Salah satu buktinya ialah dengan dibangunnya sekolah misionaris dua tingkat dengan 18 ruang kelas yang digunakan untuk HIS 14 kelas dan sisanya untuk *Meer Uitgereid Lager Onderwijs* (MULO) di Yogyakarta.¹⁹ Pembangunan sekolah tersebut hanya sebagian kecil contoh sekolah misionaris yang dibangun saat itu, belum lagi di wilayah-wilayah lain di pulau Jawa.

Tidak berbeda dengan misionaris, misi zending juga ikut bergerak dalam penyebaran agama Kristen di Hindia Belanda. Sebuah catatan pada tahun 1917 *de Gereformeerde Schoolbond van Nederlandsch-Indie te Djocjakarta* sudah berhasil mengembangkan sekolah-sekolah Kristen yang disesuaikan oleh prinsip-

¹⁸ Abdurrachman Surjomihardjo, *Sejarah Kauman: Mengungkap Identitas Kampung Muhammadiyah*. (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2010), hlm. 83-84.

¹⁹ *Ibid.*, 85.

prinsip pendidikan yang dikembangkan oleh gereja-gereja Protestan.²⁰ Abdurochman Sumodiharjo menyebutkan bahwa di Yogyakarta dalam penyebarannya, sekolah-sekolah Kristen kala itu melibatkan 34 Guru Eropa dan 13 guru Bumiputera dengan 311 murid Eropa dan 1.133 murid Bumiputera.²¹ Sebuah jumlah yang luar biasa untuk pribumi yang mampu mengenyam pendidikan di masa Kolonial Belanda.

Surat Kabar *Java Post* melansir perkembangan sekolah dan jumlah murid pada 7 September 1923, menunjukkan banyaknya siswa yang belajar di sekolah-sekolah misionaris dan zending.

TABEL 1. JUMLAH SEKOLAH LANJUTAN DI YOGYAKARTA

ELS ²²	Netral	155 murid
	Protestan	260 murid
	Katolik	337 murid
HIS	Pemerintah	843 murid
	Netral	498 murid
	Protestan	660 murid
	Katolik	761 murid
Sekolah Kelas Dua	Pemerintah	2.571 murid
	Netral	0 murid
	Protestan	243 murid
	Katolik	764 murid
	Muhammadiyah	756 murid
	Budi Utomo	194 murid
	Sarekat Islam	120 murid

Sumber : Abdurrachman Surjomihardjo, *Sejarah Kauman: Menguak Identitas Kampung Muhammadiyah*. (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2010), hlm. 82.

²⁰ Langgeng Sulisty Budi, "Fasilitas Sosial Perkotaan pada Awal Abad ke-20: Rumah Sakit dan Sekolah di Yogyakarta", *Kota-kota di Jawa*. (ed) Sri Margana & M. Nursam, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2010), hlm. 181.

²¹ Abdurrachman Surjomihardjo, *op.cit.*, hlm. 82.

²² ELS (Europese Lagere School) adalah sekolah yang diperuntukan bagi anak-anak eropa. Lihat Tim Proyek Penelitian dan Pmencatatan Kebudayaan Daerah, *op.cit.*, hlm. 25.

Munculnya sekolah-sekolah zending dan misionaris yang menawarkan pendidikan ala barat dengan fasilitas memadai dan dapat dijangkau oleh kelas bawah menarik pribumi untuk belajar dan menuntut ilmu di sekolah-sekolah tersebut. Sehingga sangat mudah bagi pribumi terpengaruh untuk melepaskan agamanya demi ilmu yang ia peroleh. Adaby Darban mengatakan,

Dengan Munculnya berbagai sekolah yang dikelola oleh pemerintah maupun Missi dan Zending Nasrani itu ada positif dan negatifnya. Positifnya, mereka yang sekolah di sekolah-sekolah Belanda itu mengetahui wawasan ilmu pengetahuan dan pengetahuan pergerakan nasional. Adapun negatifnya, beberapa orang yang telah dididik Belanda itu terpengaruh dan menjadi pengikut kolonial, disamping itu juga aqidah Islamnya mengambang, bahkan adapula yang pindah agama ke Nasrani.²³

Pernyataan tersebut juga diperkuat dengan dukungan pemerintah kepada sekolah-sekolah Kristen dan Katolik yang lebih besar dari pada sekolah Islam.

Mereka juga memberikan bantuan keuangan dan materil kepada sekolah-sekolah swasta Protestan dan Katolik. Selain itu mereka memberikan bantuan kepada lembaga-lembaga pendidikan Islam yang memberikan pelajaran-pelajaran sekuler, tetapi hanya sampai batas tertentu. Dalam tahun ajaran 1938-1939, subsidi telah diberikan kepada 2016 sekolah-sekolah Protestan, 728 sekolah Katolik dan 133 sekolah Islam.²⁴

Jumlah yang cukup sedikit untuk sekolah Islam yang ada pada waktu itu, padahal bukan jumlah sekolahnya yang sedikit namun memang karena adanya unsur politis didalamnya. Kondisi tersebut diperparah juga dengan munculnya fasilitas-fasilitas kesehatan yang dibangun oleh zending. Menurut Groot, rumah sakit

²³ Ahmad Adaby Darban. "Latar Belakang Berdirinya Muhammadiyah", Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Pustaka (Ed). *Kerangka acuan penulisan sejarah Muhammadiyah berdasarkan keputusan rapat tiap-tiap kelompok tim penelitian dan penulisan sejarah Muhammadiyah*, Yogyakarta: Pimpinan Pusat Muhammadiyah, tanpa tahun, hlm. 12.

²⁴ Selo Soemardjan, *Perubahan Sosial di Yogyakarta*. (Jakarta: Komunitas Bambu, 2009), hlm. 18.

zending merupakan rumah sakit yang terbuka dan tidak mengenal perbedaan-perbedaan yang sebelumnya menjadi dasar klasifikasi yang dilakukan oleh pemerintah Kolonial Belanda.²⁵ Hal tersebut menjadikan betapa mudahnya masyarakat untuk menikmati fasilitas kesehatan tanpa mengenal agama maupun kedudukan, tidak seperti rumah sakit pemerintah yang dibahas sebelumnya.

Kemudahan yang diberikan oleh zending bukan tanpa alasan, sama dengan munculnya fasilitas pendidikan munculnya rumah sakit-rumah sakit tersebutpun merupakan upaya zending untuk melakukan Kristenisasi. Para tenaga medis yang dibawa zending sudah dipersiapkan untuk menyebarkan agama Kristen di Hindia Belanda. Hal tersebut jelas tertuang dalam Aturan Rumah Tangga (ART) zending pasal 40 dan diperjelas dalam tata zending no 9 yang menyebutkan bahwa:

pertama para utusan dalam menjalankan misi keagamaan harus didampingi oleh orang-orang yang bewenangbekerja dalam bidang pelayanan kesehatan baik sebagai dokter maupun juru rawat. *Kedua* pelayanan kesehatan harus ditujukan pada hal yang mendirikan serta mengelola suatu rumah sakit.²⁶

Pemanfaatan fasilitas kesehatan dan pendidikan oleh misionaris dan zending tentu saja merupakan cara cerdas untuk menarik simpati masyarakat. Sehingga masyarakat pun dengan mudah untuk di pengaruhi oleh gerakan-gerakan tersebut. Hal tersebutlah yang menimbulkan kekhawatiran bagi pengurus Muhammadiyah di masa itu untuk mendirikan amal usaha sosial yang bisa menyentuh kalangan kelas bawah agar bisa menghalau upaya-upaya yang dilakukan oleh zending dan misionaris.

²⁵ Baha'uddin, *op.cit.* hlm. 165.

²⁶ *Ibid.*

C. Realisasi Ajaran surat Al-Ma'un

Surat Al-Ma'un menjadi faktor terbesar lahirnya PKO Muhammadiyah setelah dua faktor yang telah disebutkan diatas. Hal tersebut terjadi karena pada suatu ketika dalam sebuah majelis K.H Ahmad Dahlan sebagai pendiri Muhammadiyah pernah mengajarkan surat Al-Ma'un berulang-ulang. Junus Salam mengkisahkan sebagai berikut,

Dalam Kuliah Subuh, berulangkali Kiai mengajarkan tafsir surah al-Ma'un, hingga beberapa pagi hari tidak ditambah-tambah.

“Kiai! Mengapa pelajarannya tidak ditambah-tambah?” Pak. H Suja' bertanya

“Apa kamu sudah mengerti betul?” tanya beliau pula

“Kita sudah hafal semua, Kiai?” jawab pak Sujak'

“Kalau sudah hafalapa sudah kamu amalkan?” tanya Kiai.

“Apanya yang diamalkan? Bukankah surah al-Ma'un berulang kali kami baca untuk rangkapan Fatikah dikala kami salat?” jawab pak H. Suja'.

“Bukan itu yang saya maksudkan. Diamalkan, artinya dipraktikkan, dikerjakan! Rupanya Saudara-saudara belum mengamalkannya. Oleh karena itu, mulai hari ini, saudara-saudara pergi berkeliling mencari orang miskin. Kalau sudah dapat, bawa planglah kerumahmu masing-masing . Berilah mereka mandi dengan sabun yang baik, berilah pakaian yang bersih, berilah makan dan minum, serta tempat tidur dirumahmu.

Perintah yang diajarkan oleh K.H. Ahmad Dahlan tersebut, terus terkenang dalam diri H. M. Soedja'.

Kisah tentang surat Al-Ma'un terus memotivasi para pengurus Muhammadiyah untuk melakukan kegiatan-kegiatan sosial yang nantinya menjadi Penolong Kesusaraan Omoem atau PKO yang masih dalam bentuk organisasi kecil dan belum resmi menjadi bagian dari Muhammadiyah. Kegiatan-kegiatan PKO Muhammadiyah meski belum resmi menjadi bagian Muhammadiyah sudah banyak dilakukan dan melibatkan organisasi-organisasi anak Muhammadiyah. Misalkan saja pada tahun 1914 PKO sudah memiliki kegiatan pertolongan

terhadap anak-anak yatim piatu yang di bantu oleh perkumpulan Sapa Tresna²⁷. Catatan lain dari Deliar Noer mengatakan PKO Muhammadiyah juga terlibat dalam menangani korban meletusnya Gunung Kelud tahun 1919.²⁸

Surat Al Ma'un terus memotivasi para pengurus Muhammadiyah untuk memberikan pertolongan bukan hanya kepada orang miskin dan yatim saja namun namun lebih kepada usaha-usaha pertolongan yang lebih konkrit. Deliar Noer mengkisahkan sebagai berikut,

Kira-kira pada waktu yang sama ia mulai pula mengorganisir kawan-kawannya di daerah Kauman untuk melakukan pekerjaan sukarela dalam memperbaiki kondisi higienis daerahnya dengan memperbaiki dan membersihkan jalan-jalan dan parit-parit.

Perubahan-perubahan ini, walaupun bagi kita sekarang mungkin sangat kecil artinya, memperlihatkan kesadaran Dahlan tentang perlunya membuang kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik dan yang memang menurut pendapatnya memang tidak sesuai dengan Islam. Perubahan-perubahan ini tidak perlu datang dari pengaruh orang-orang lain, sebab kaum tradisi (dan kitab-kitab mereka juga) mengakui bahwa kiblat haruslah menuju ke ka'bah, dan bahwa seorang Muslim haruslah bersih dari segala kekotoran. Masalahnya adalah apakah praktek sama dengan teori dan dalam hal ini teori yang mudah diperoleh di dalam kitab-kitab tradisi.²⁹

²⁷ Sapa Tresna ialah cikal bakal berdirinya organisasi 'Aisiyah yang didirikan pada tahun 1914 yang bertugas membantu kerja PKO. Lambat laun Sapa Tresna yang didalamnya berisi para wanita Kauman membentuk organisasi wanita Muhammadiyah pada tanggal 22 April 1917 dengan nama *Aisijjah* ('Aisiyah). Lihat Ahmad Adaby Darban *Sejarah Kauman: Mengungkap Identitas Kampung Muhammadiyah*. (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2010), hlm. 56-57.

²⁸ Tanpa Penulis, *Verslag openbare vergedering P.K.O, Soewara Moehammadijah, No. 10 Tahoen. 4*, hal. 193. Lihat juga Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*. (Jakarta: LP3ES, 1982), hlm. 90. Pada tulisan Deliar Noer dituliskan 1918 lebih dulu setahundibanding tulisan yang diterbitkan *Soewara Moehammadijah*, namun penulis lebih menggunakan angka tahun yang dikeluarkan oleh *Soewara Moehammadijah* karena selain sebagai pelaku dalam peristiwa tersebut, juga tahun penerbitan dengan peristiwa yang terjadi lebih dekat dari pada tulisan Deliar Noer.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 85.

Hal-hal sederhana tersebutlah yang diajarkan oleh Ahmad Dahlan sehingga bukan hanya kebersihan dan kenyamanan yang dirasakan masyarakat, namun juga menambah daya tarik orang untuk turut terlibat dalam kegiatan Muhammadiyah dan PKO. Melihat kondisi masyarakat sejak munculnya Politik Etis dan maraknya upaya zending dan misionaris yang berkeinginan memurtadkan pribumi menjadikan semakin menguatkan pengurus Muhammadiyah dalam membangun pertolongan khususnya kepada masyarakatan bawah baik segi pendidikan maupun kesehatan.